

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari sistem Islam, karena tanpa negara, Islam secara sistem tidak akan dapat berjalan utuh. Tanpa negara, Islam tidak dapat mencapai tujuan hakikinya, yakni menjadi agama yang *rahmatan lil alamin* atau agama yang memberikan rahmat kepada seluruh bumi beserta isinya. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang sangat vital untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam suatu negara dan sistem kenegaraan.<sup>1</sup>

Ketika negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai pun harus sesuai dengan kehendak Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah swt. Menurut Kahf sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda, tujuan utama dari suatu negara Islami adalah untuk melindungi agama Islam dan menegakkan supremasi kalimat tauhid *la ilaha illallah*.<sup>2</sup> Untuk menegakkan tujuan tersebut, maka negara sudah semestinya menjalankan seluruh lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga ekonomi dan sosial lainnya, dengan landasan prinsip Islam.

---

<sup>1</sup>Nurul Huda, *et al. Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 49.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 49.

Tujuan hakiki dari suatu negara Islam adalah untuk memberikan *maslahah* kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. *Maslahah* ini hendaknya dapat mengantarkan seluruh anggota masyarakatnya kepada kemakmuran di dunia dan akhirat. Dengan demikian pemerintahan negara Islam harus mengimplementasikan orientasi material dan spiritual. Jika orientasi ini dijalankan, maka negara akan mampu berbuat adil bagi seluruh anggota masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat.

Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas, Allah swt menerangkan perintah untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>3</sup>

Untuk persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat

---

<sup>3</sup>Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 46.

akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Dengan demikian, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara merata dan adil. Sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut.

Agar keadilan tersebut dapat tercapai, maka negara bisa mengalokasikan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara. Tanpa adanya pengalokasian yang bijak, maka akan terjadi inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Inefisiensi ini akan membawa dampak yang sangat luas baik dalam dimensi ruang maupun waktu. Salah satu dampaknya adalah terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara, karena sumber daya ekonomi yang tidak dialokasikan secara merata untuk masing-masing wilayah.<sup>4</sup>

Islam menegakkan keadilan dan kejujuran dalam produksi maupun distribusi kekayaan dan dalam pemilikan alat-alat untuk mencari mata pencaharian. Namun Islam juga menyadari bahwa, sama halnya dengan soal-soal alami yang lain, tidak akan ada kesamaan di antara manusia dalam hal barang-barang ekonomi maupun pemilikan kekayaan duniawi. Ketimpangan ini telah disampaikan oleh Al-Qur'an sebagai bagian dari aturan ekonomi ketuhanan. Al-

---

<sup>4</sup>Nurul Huda, *et al. op. cit.*, hlm. 50-51.

Qur'an tidak melihat ketimpangan dalam distribusi tersebut sebagai pahala ataupun hukuman dan tidak pula berusaha untuk melenyapkannya, karena tidak ada dua orangpun di dunia ini yang dianugerahi kemampuan mental dan fisik yang seratus persen sama.

Dengan mengakui ketimpangan sebagai bagian dari rencana ketuhanan, maka Al-Qur'an menasihati para pemeluknya agar tidak merasa iri hati kepada saudaranya yang mendapat anugerah lebih. Dengan melebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam status maupun dalam pemberian, Tuhan sebenarnya mencoba dan menguji manusia, apakah mereka bersyukur kepada-Nya dalam kebaikan dan bersabar dalam keburukan.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'aam/6: 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ  
وَإِنَّهُ لَعَزِيزٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>6</sup>

Ketimpangan ekonomi terjadi karena tidak sesuai kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Salah satu contohnya adalah penertiban pedagang yang ada di Taman Kota Sampit oleh pemerintah. Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah

---

<sup>5</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27-28.

<sup>6</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Disertai Hadis-Hadis Penjelas Ayat*, (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), hlm. 150.

ingin mengembalikan fungsi taman kota Sampit menjadi ruang terbuka hijau, sehingga dapat dijadikan objek wisata dan rekreasi keluarga saat libur tiba.

Walaupun, kebijakan itu untuk mensejahterakan warga di Sampit, akan tetapi kebijakan itu menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di taman kota Sampit tersebut. Setelah direlokasi dari taman kota Sampit ke Pasar Eks Mentaya Theater, jumlah pendapatan pedagang berkurang drastis. Hal itu dikarenakan tempat yang disediakan oleh pemerintah terbilang cukup sempit yaitu hanya berukuran 1,5 x 1,5 meter. Ukuran tersebut sangat sempit, sehingga sangat menyulitkan pedagang untuk memaparkan barang dagangannya. Dan tempat yang disediakan oleh pemerintah ini terbilang *mubazir*. Dikarenakan banyak pedagang yang memilih berjualan di tempat lain yang lebih luas agar bisa berdagang dengan leluasa. Akibatnya tempat yang disediakan pemerintah di Pasar Eks Mentaya Theater ini hanya diisi pedagang pada lantai bawah saja, dan lantai 2 pada bangunan ini tidak ditempati pedagang.

Di sinilah peneliti ingin mencari tahu lebih dalam mengenai keadaan perekonomian pedagang sebelum atau sesudah ditertibkan oleh pemerintah. Apakah penghasilan mereka meningkat ataukah menurun? Dan bagaimana kiat-kiat para pedagang di taman kota Sampit dalam memperbaiki perekonomian mereka apabila penjualan terus menurun?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud ingin membahasnya lebih lanjut mengenai "Analisis Dampak Kebijakan Bupati Kotim

Untuk Menertibkan Pedagang di Taman Kota Sampit Terhadap Perekonomian Masyarakat”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan Bupati Kotim terhadap perekonomian pedagang di taman kota Sampit?
2. Bagaimana kiat-kiat para pedagang di taman kota Sampit dalam memperbaiki perekonomian mereka apabila penjualan terus menurun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan Bupati Kotim terhadap perekonomian pedagang di taman kota Sampit.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kiat-kiat yang digunakan oleh para pedagang di taman kota Sampit dalam memperbaiki perekonomian mereka apabila penjualan terus menurun.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan di atas, manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan tentang Analisis Dampak Kebijakan Bupati Kotim Untuk Menertibkan Pedagang di Taman Kota Sampit Terhadap Perekonomian Masyarakat.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Mahasiswa

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah menambah wawasan ataupun bahan referensi untuk kajian selanjutnya yang terkait untuk mengembangkan masalah yang hampir sama dengan penulis angkat.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

c. Bagi Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) adalah sebagai bahan acuan untuk proses pengambilan dan penerapan kebijakan publik pemerintah daerah, khususnya tata ruang pembangunan infrastruktur di Sampit Kalimantan Tengah.

d. Bagi Masyarakat

Kegunaan praktis bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami usaha Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya pedagang.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka dalam hal ini penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>7</sup>
2. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>8</sup> Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai perekonomian pedagang, apakah kebijakan Bupati Kotim (Kotawaringin Timur) ini berdampak positif atau negatif bagi perekonomian mereka.
3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).<sup>9</sup> Kebijakan dalam penelitian ini adalah kebijakan Bupati Kotim (Kotawaringin Timur) untuk menertibkan pedagang di taman kota Sampit.

---

<sup>7</sup><http://kbbi.web.id/> diakses pada 31 Juli 2017 jam. 14.00 WITA.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*



4. Menertibkan adalah mengatur, merapikan menjadikan tertib.<sup>10</sup> Menertibkan dalam penelitian ini yaitu pemerintah yang menertibkan pedagang di taman kota Sampit.
5. Pedagang adalah orang yang membeli dan menjual barang dengan niat dagang.<sup>11</sup> Pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang menengah {seperti; kios pakaian, depot makanan, PKL (Pedagang Kaki Lima), dan lain sebagainya} yang berjualan di taman kota Sampit.
6. Perekonomian adalah tindakan (aturan atau cara) berekonomi. Perekonomian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persentase penghasilan dan fleksibilitas ekonomi pedagang yang berjualan di taman kota Sampit.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis membuat kajian pustaka dari penelitian yang sebelumnya di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Ershad Selesa (103046128257) Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008 dengan judul *Analisa Kebijakan Pemerintah Tentang Koperasi Syariah Ditinjau dari Perspektif Islam*.

---

<sup>10</sup>Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2011), hlm. 526.

<sup>11</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 587.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa isi kandungan keputusan pemerintah. Yaitu pemerintah memberikan solusi berupa Keputusan Menteri Koperasi dan UKM yang disingkat Kepmenegkop sebagai “batu loncatan” bagi landasan hukum kegiatan koperasi syariah. Setelah ada keputusan menteri ini, bukan berarti keputusan tersebut luput dari pengkajian bagi sarjana-sarjana muslim untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut kesesuaian antara konsep Islam dengan rumusan keputusan pemerintah yang terangkum dalam keputusan menteri tersebut.

Hasil dari penelitian ini menemukan sejumlah penemuan yang berbanding lurus antara prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan ekonomi dengan isi kandungan dari keputusan ini. Meskipun demikian, keputusan menteri ini masih ditemukan pula sejumlah kekurangan yang substansial dan harus diperbaiki oleh pembuat kebijakan supaya tidak mengurangi isi kualitas dari keputusan ini.<sup>12</sup>

2. Skripsi Encep Zacky Koerdianto (A 14105538) Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008 dengan judul *Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Sayuran Unggulan (Kasus Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Dan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) Tingkat keuntungan perusahaan komoditas sayuran unggulan secara finansial dan ekonomi di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dan di Kecamatan

---

<sup>12</sup>Ershad Selesa, *Analisa Kebijakan Pemerintah Tentang Koperasi Syariah Ditinjau dari Perspektif Islam*, skripsi ini tidak di terbitkan, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm.vi.

Lembang Kabupaten Bandung Barat; (2) Daya saing komoditas sayuran unggulan di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat melalui keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif; (3) Dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing komoditas sayuran unggulan di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat; (4) Dampak perubahan kebijakan pemerintah daerah terhadap daya saing komoditas sayuran unggulan di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha tani tomat dan cabe merah di kedua tempat penelitian menguntungkan baik secara finansial maupun secara ekonomi. Jika dibandingkan, usaha tani tomat dan cabe merah di Kecamatan Lembang memberikan keuntungan finansial yang lebih besar dibandingkan di Kecamatan Ciwidey. Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Lembang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif untuk menghasilkan komoditas sayuran unggulan. Berdasarkan kriteria keunggulan komparatif, kecamatan Ciwidey relatif lebih memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Kecamatan Lembang untuk menghasilkan kedua komoditas sayuran unggulan tersebut. Sementara berdasarkan kriteria keunggulan kompetitif, Kecamatan Lembang relatif lebih memiliki keunggulan kompetitif dibanding Kecamatan Ciwidey untuk komoditas tomat. Sedangkan untuk cabe merah, walaupun perbedaannya tidak signifikan, Kecamatan Ciwidey relatif lebih memiliki keunggulan kompetitif dibanding Kecamatan Lembang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan kebijakan pemerintah yang ada sekarang, usahatani tomat dan cabe merah di Kecamatan Lembang cenderung lebih diuntungkan, karena dengan adanya kebijakan ternyata usahatani tersebut di Kecamatan Lembang dapat memiliki keunggulan kompetitif yang relatif sama untuk usahatani cabe merah dan bahkan lebih memiliki keunggulan kompetitif untuk usahatani tomat dibandingkan Kecamatan Ciwidey.

Dampak kebijakan output terhadap usaha tani tomat dan cabe merah menyebabkan usaha tani tomat dan cabe merah di kedua tempat penelitian menerima harga aktual output lebih kecil dari harga sosialnya. Sedangkan berdasarkan analisis terhadap kebijakan input menunjukkan bahwa pemerintah memberikan subsidi atas input asing (*tradable*) dan domestik (*non tradable*), sehingga petani menerima harga aktual input tersebut lebih murah dari yang seharusnya dibayarkan jika tanpa adanya kebijakan. Secara umum kebijakan pemerintah terhadap input-output yang ada lebih menguntungkan usahatani kedua komoditas tersebut di Kecamatan Lembang. terjadinya peningkatan biaya produksi, penurunan harga output dan penurunan produksi yang dilakukan baik secara parsial maupun gabungan menyebabkan tingkat keuntungan yang semakin kecil dan nilai PCR dan DRC yang semakin besar mendekati satu. Namun, perubahan tersebut tidak sampai merubah keuntungan menjadi negatif (rugi) maupun merubah keunggulan kompetitif

dan keunggulan komparatif menjadi tidak berdaya saing sehingga usahatani komoditas sayuran ini tetap layak untuk terus dikembangkan.<sup>13</sup>

3. Skripsi Merika Sondang Sinaga (A 14304029) Jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya Institut Pertanian Bogor 2008 dengan judul *Analisis Nilai Tambah dan Daya Saing Serta Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Industri Tempe di Kabupaten Bogor (Kasus: Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup)*.

Tujuan penelitian ini dijawab dengan menggunakan analisis nilai tambah Meode Hayami. Perhitungan nilai tambah ini didasarkan pada satu satuan bahan baku utama yaitu satu kilogram kedelai. Selain itu, digunakan pula alat analisis *Policy Analysis Matrix* dan analisis sensitivitas. Melalui pendekatan ini akan dilihat bagaimana keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki industri tempe di Kabupaten Bogor sekaligus dampak kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait dengan kegiatan produksi pada industri tersebut. PAM bersifat statis sehingga untuk melihat seberapa besar pengaruh dan tingkat kepekaan apabila terjadi perubahan-perubahan baik pada input yang digunakan maupun pada output yang dihasilkan akibat perubahan yang terjadi, maka dilakukan analisis sensitivitas sebagai langkah lanjutan. Perhitungan nilai tambah pada industri tempe di desa Citeureup dilakukan pada periode produksi Maret 2008. Pada dasarnya, pengrajin tempe di daerah penelitian melakukan kegiatan produksinya setiap hari sehingga struktur biaya

---

<sup>13</sup>Encep Zacky Koerdianto, *Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Sayuran Unggulan (Kasus Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Dan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)*, skripsi ini tidak di terbitkan, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. vi.

yang digunakan merupakan struktur biaya produksi rata-rata setiap hari dikali tiga puluh. Struktur biaya produksi pada industri tempe terdiri atas biaya pengadaan bahan baku kedelai (78,44 persen), bahan baku lainnya (5,67 persen), tenaga kerja (8,30 persen), penyusutan peralatan (6,06 persen), pajak (0,78 persen), dan sewa tempat (0,75 persen). Hasil perhitungan analisis nilai tambah menunjukkan bahwa nilai faktor konversi pada industri tempe sebesar 1,6. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap satu kilogram kedelai yang diolah akan menghasilkan 1,6 kilogram tempe. Industri pengolahan kedelai menjadi tempe di Desa Citeureup menunjukkan bahwa industri tersebut mampu menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 2.198,91 per kilogram input kedelai. Rasio nilai tambah yang dimiliki yaitu 21,14 persen. Nilai koefisien tenaga kerja yang diperoleh yaitu 0,02. Nilai ini dapat diinterpretasikan sebagai jumlah Hari Orang Kerja yang diperlukan untuk memproduksi satu kilogram kedelai hingga menjadi tempe adalah 0,02 HOK (1 HOK = 7 jam kerja). Apabila nilai koefisien tenaga kerja tersebut dikali dengan banyaknya unit usaha tempe di Indonesia maka dapat dilihat banyaknya jumlah tenaga kerja yang dapat terserap oleh industri tempe.

Hasil dari penelitian ini menemukan sejumlah penemuan yaitu Industri tempe di desa Citeureup layak untuk dijalankan baik berdasarkan perhitungan pada analisis finansial maupun analisis ekonomi. Di samping itu, industri tersebut dapat dikatakan memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Hal ini terlihat dari nilai PCR dan DRC nya yang lebih kecil dari satu. Berdasarkan analisis kebijakan pemerintah pada sisi output,

industri tempe di daerah penelitian memiliki TO dan NPCO masing-masing senilai Rp -1.555,14 dan 0,8699 ( $\text{NPCO} < 1$ ). Pada analisis kebijakan pemerintah pada sisi input diketahui TI senilai Rp 180,25, NPCI sebesar 1,0765, dan transfer faktor senilai Rp 261,91. Analisis kebijakan input-output dapat didekati dengan menggunakan indikator EPC, TB, PC, dan SRP. Nilai keempat indikator tersebut masing-masing secara berurutan adalah 0,8192; Rp -1.997,30; 0,5274; dan -0,2540. Apabila terjadi kenaikan harga kedelai sebesar 60 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tidak berubah, maka industri tempe di daerah penelitian tidak lagi memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini terlihat dari keuntungan privat yang bernilai negatif dan nilai PCR yang lebih besar dari satu. Sebaliknya, berdasarkan analisis ekonomi, meskipun terjadi perubahan harga kedelai industri tempe di daerah penelitian masih tetap memiliki keunggulan komparatif. Hal ini terlihat dari keuntungan sosial senilai Rp 263,69 dengan nilai DRC 0,9680 ( $\text{DRC} < 1$ ). Jika kenaikan harga input kedelai sebesar 60 persen diimbangi pula dengan kenaikan harga output sebesar 46 persen, industri tempe di Desa Citeureup ternyata layak untuk diteruskan baik secara finansial maupun ekonomi. Di samping itu, industri tempe juga efisien secara finansial maupun ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai PCR dan DRC yang dihasilkan lebih kecil dari satu, dengan kata lain industri tersebut masih memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Merika Sondang Sinaga, *Analisis Nilai Tambah dan Daya Saing Serta Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Industri Tempe di Kabupaten Bogor (Kasus: Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup)*, skripsi ini tidak di terbitkan, (Bogor: Fakultas Ekonomi Institut Pertanian, 2008), hlm. vi.

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada *“Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Penerapan Kebijakan Bupati Kotim Terhadap Perekonomian Pedagang Di Taman Kota Sampit”*. Penelitian ini membahas tentang dampak apa saja yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah ini apakah berdampak positif/negatif bagi perekonomian pedagang dan kiat-kiat yang dilakukan oleh pedagang dalam memperbaiki perekonomian mereka jika penjualannya terus menurun. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan penulis teliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini ditulis secara sistematis dan terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I pendahuluan merupakan bab yang berisikan mengenai latar belakang masalah, bagian ini menjelaskan masalah yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam masalah yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah yang berisi permasalahan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang menyebutkan secara spesifik sasaran yang hendak dicapai dari penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Signifikansi penelitian, bagian ini dipaparkan secara spesifik kontribusi keilmuan yang baru diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Definisi



operasional, bagian ini mengemukakan definisi-definisi yang mengandung sejumlah karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru. Penelitian terdahulu, bagian ini berisi paparan hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu terhadap persoalan yang dikaji dalam skripsi. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian diantara penelitian-penelitian terdahulu. Adapun sistematika penulisan, bagian ini diuraikan secara sistematis, logis, dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

Bab II landasan teori, bagian ini berisi kerangka konseptual yang dimanfaatkan peneliti sebagai pemandu peneliti di lapangan. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti; teori tentang kebijakan pemerintah, teori tentang ekonomi konvensional dan syariah.

Bab III metode penelitian, merupakan metode yang menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, lokasi penelitian, data, dan sumber data yang berhubungan dengan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, kemudian setelah itu data dianalisis dengan teknik analisis data tertentu, untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir, maka dibuatlah sistematika tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan mengenai perekonomian pedagang serta penyajian data dan analisis data tentang analisis dampak kebijakan Bupati Kotim untuk menertibkan pedagang di taman kota Sampit terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Bab V penutup, memuat simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Bagian ini berisikan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran-saran memuat beberapa implikasi penelitian yang terkait langsung dengan pemecahan masalah dalam skripsi.